

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG MASALAH**

Situasi Politik Indonesia pada dekade tahun 1950-an memang tidak dapat dipungkiri berada dalam kekacauan dan ketidakstabilan pemerintahan, hal ini tercermin dengan banyaknya pemberontakan-pemberontakan yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia seperti pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), dan Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Salah satu pemberontakan yang paling lama dan banyak menyita kerugian adalah Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar atau yang lebih dikenal Kahar Muzakkar.

Salah satu latar belakang Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan ini adalah karena ia merasakan adanya ketidakseimbangan kehidupan antara pusat dan daerah, atau Jawa dan Luar Jawa. Dalam hal ini, Kahar Muzakkar memandang bahwa kemajuan hanya terfokus di pusat saja sedangkan kehidupan di daerah terabaikan, sehingga ia menganggap bahwa Presiden Soekarno telah gagal dalam melaksanakan konsep demokrasi Indonesianya. Sebagaimana dikemukakan oleh

Barbara Sillars Harvey (1989:181), pengamat politik dari Monash University, menilai bahwa :

Gerakan Kahar Muzakar bermula dari adanya perasaan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Merasa tidak dihargai dan seakan-akan nasibnya ditentukan secara tidak adil oleh orang-orang yang kurang memahami aspirasi daerah. Karena pusat didominasi orang Jawa dan Minahasa, maka sentimen perasaan itu mengalami distorsi menjadi sentimen kesukuan.

Kahar Muzakkar berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah perjuangan kebangsaan Indonesia, bukan pula revolusi nasional Indonesia, tapi ini menurutnya hanyalah sebuah cetusan semangat kemerdekaan segenap suku bangsa Indonesia, yang merupakan revolusi individual yaitu revolusi yang spontan yang digerakan hanya untuk membebaskan diri dari penindasan feodalisme Indonesia dan dari penjajahan Jepang dan Belanda. Kemudian ia menambahkan bahwa Setelah itu Soekarnolah yang melakukan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.

Menurut Kahar Muzakkar, timbulnya pergolakan-pergolakan diwilayah Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945 ataupun setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda tahun 1949 adalah kekacauan yang disebabkan oleh kegagalan Presiden Soekarno dalam praktek demokrasi Indonesiannya. Karena Soekarno dianggap terlalu berambisi untuk mewujudkan cita-cita penjajahan Majapahitnya, yaitu menginginkan daerah-daerah bekas wilayah kerajaan Majapahit agar menjadi wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Sehingga menurutnya, hal ini dianggap sebagai penjajahan Soekarno terhadap daerah-daerah yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan kolonial. (Kahar Muzakkar, 2008:24-25).

Dari penejelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama gerakan Kahar Muzakkar adalah melawan pemerintahan Soekarno, sosok yang dianggapnya mengecewakan dan sebagai wujud ketidakpuasannya terhadap cara pemerintah merasionalisasi para gerilyawan Sulawesi Selatan dari masa revolusi kedalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam hal ini, para gerilyawan Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS) menginginkan tempat yang layak dalam TNI dengan format Resimen yang diberi tugas dan tempat pada suatu daerah tertentu, yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar sebagai komandan Resimen tersebut. Namun, usulan ini ditolak oleh Kawilarang yang bertugas sebagai panglima *Komando Tentara dan Teritorial Indonesia Timur (KTTIT)*. Kawilarang menghendaki hanya para gerilyawan yang memenuhi syarat-syarat saja yang bisa masuk kedalam Tentara Nasional Indonesia. Maka inilah yang menjadikan pasukan KGSS (Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan) kecewa dan menjauh dari tempat kedudukan TNI masuk kedalam hutan.

Pada tanggal 5 Juli 1950 secara resmi Kahar Muzakkar meletakkan tanda pangkat Letkolnya di depan Kol. Kawilarang, dan memilih bergabung dengan pasukan KGSS sebagai bukti dukungan serta perasaan ketidakpuasannya atas kebijakan panglima KTTIT di Sulawesi Selatan. Ketidakpuasan dan kekecewaan ini, bagi seorang yang berjiwa Bugis-Makasar biasanya disebut "*Siri-Pesse*" yang bisa diartikan yaitu mempertahankan harga diri dengan mempertaruhkan nyawa dan memiliki perasaan senasib sebagai seorang Bugis-Makasar (Kholid O. Santosa, 2009:199).

*Lewis Coser* (2003), seorang sosiolog mengatakan bahwa dalam hal ini, perlawanan serta pemberontakan dan upaya disintegrasi yang dilakukan oleh Kahar Muzakar dapat dilihat dari konteks sejarah politiknya. Karena, Indonesia sebagai negara dan bangsa yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, kultur, adat, budaya, dan sistem sosial mengakibatkan proses demokrasi yang ada tidak berjalan dengan mulus. Lebih lanjut, Coser melihat konflik ini sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian yang dapat memberi peran positif atau fungsi positif dalam masyarakat (<http://nusantaracenter.co.id>) Di akses di Bandung [1 November 2010].

Dua tahun setelah Kahar Muzakkar beserta pasukannya bergerilya dan menyatakan perlawanan terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ia mencoba membentuk sebuah pasukan Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR) sebagai bentuk pertahanan terhadap serangan TNI. Selain itu, Ia pun menggalang kekuatan-kekuatan sosial kepada masyarakat, usaha penggalangan kekuatan tersebut dilakukan terutama terhadap masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Dan penggalangan kekuatan-kekuatan ini semakin kuat setelah Kahar Muzakkar menerima tawaran dari S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat untuk menjadi pemimpin Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi Selatan dan menjadi Panglima Divisi XVI tentara Islam Indonesia yang disebut juga sebagai Devisi Hasanuddin.

Pada tahun 1952 Kahar Muzakkar menyatakan resmi bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat, kedekatan hubungan tersebut membuat Kahar Muzakar mengalami perubahan haluan berpikir dari ideologi Pancasila menjadi sosok yang idealis dengan ideologi Islamnya. Namun sejak awal Ia menyatakan dalam

suratnya kepada Kartosoewirjo, bahwa ia tidak akan sepenuhnya mengabdikan diri terhadap Negara Islam Indonesia (NII). Dan hal ini senada dengan pernyataan Kholid

O. Santosa (2009:201) bahwa :

Demikianlah, ia menjadi panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, yang juga disebut Divisi Hasanuddin. Dalam sepucuk surat menanggapi dan menerima pengangkatannya, ia menyatakan bahwa ia berterima kasih dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan Kartosoewirjo itu. Namun ia juga menyatakan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap Negara Islam Indonesia (DI/NII/TII) karena berbagai keadaan yang merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilnya sebagai panglima Tentara Islam. Ia juga menyatakan bahwa diantara lima Bataliyon yang dipimpinnya, terdapat beberapa kelompok bukan muslim yang dipengaruhi oleh ide-ide komunis.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Kahar Muzakkar tidak selamanya setuju dengan paham Kartosoewirjo, salah satu perbedaan paham antara mereka adalah mengenai konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Kartosoewirjo menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan di bawah payung Islam. Sedangkan Kahar Muzakkar cenderung menginginkan Indonesia menjadi negara federal sehingga asas Islam tidak perlu diterapkan di seluruh wilayah negara. Pada tahun 1962, ia memecah diri dari Kartosoewirjo dengan mendirikan Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar memiliki persepsi berbeda, ia mengharapkan bentuk negara federal Islam yang mengusung sistem pemerintahan *Demokrasi Sejati* (Kahar Muzakkar, 2008:80).

Berbeda dengan Kahar Muzakkar, Kartosoewirjo menginginkan Indonesia menjadi negara Islam Indonesia yang berbentuk Presidensial. Dalam pandangannya, pemerintahan Indonesia yang berbentuk Presidensial ini dipegang oleh Presiden

sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Kahar Muzakkar mengharapkan pembentukan negara-negara bagian dengan mengedepankan keadilan sosial. Ia sangat menghormati beragam agama dan kepercayaan di Indonesia. Sehingga, dalam negara-negara bagian mempunyai bentuk pemerintahan negara bagian sendiri, tapi tentu saja berdasarkan ajaran agama dan peradabannya masing-masing, dan menurut ketentuan yang dinyatakan dalam Undang Undang Dasar negara bagian masing-masing. Dengan demikian, menurut Kahar Muzakkar, masing-masing golongan suku bangsa Indonesia akan hidup dalam lingkungan daerah negara bagiannya dengan bebas merdeka (Kahar Muzakkar, 2008:80).

Bentuk negara bagian yang dikehendaki oleh Kahar Muzakkar bisa dilakukan dengan menetapkan bentuk negara-negara bagian dalam *principe* menegakan norma-norma hidup bermasyarakat harmonis, demokratis dan damai. Pembentukan negara-negara bagian tersebut menurutnya, bisa berdasarkan pada *administrative indeling*, daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besar, seperti Jawa, Madura, Pasundan, Aceh dll, ataupun berdasarkan daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang kecil diluar pulau Jawa, ditambahkan dengan penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa. Dalam negara-negara bagian itu masing-masing golongan suku bangsa mempunyai bentuk pemerintahan sendiri berdasarkan ajaran agama dan peradabannya sendiri-sendiri, tergantung pada ketentuan yang dinyatakan dalam UUD negara tersebut. Tetapi tentu saja, masih dalam ikatan pemerintahan demokratis Indonesia.



Inilah gambaran umum pemikiran Kahar Muzakkar mengenai konsep negara dan pemerintahan Indonesia, yang bagi penulis sendiri sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, peran Kahar Muzakkar di Indonesia pun perlu diteliti kembali mengapa seorang Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan terhadap NKRI? Mengapa ia bergabung dengan Darul Islam Kartosoewirjo di Jawa Barat? Mengapa pula tahun 1962 Kahar Muzakkar menyatakan berpisah dari DII/TII? Apakah ada perbedaan pemikiran mengenai konsep negara antara Kartosoewirjo dan Kahar Muzakkar? Serta bagaimana gerakan dan pemikiran politik Kahar Muzakkar tersebut. Pertanyaan-pertanyaan diatas menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis, sebenarnya *Bagaimana Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia ?*.

Inilah alasan ketertarikan penulis ingin mengkaji hal tersebut, dan mengangkatnya kedalam sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi, dengan permasalahan utama yaitu *"Bagaimana Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia"* sebagai suatu kajian sejarah politik dan sejarah Intelektual dengan judul **Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar Tentang Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia**.

Adapun maksud dari pemakaian judul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemikiran

Lorens Bagus (1996:793) dalam kamus filsafat mendefinisikan bahwa pemikiran merupakan daya rasional/nalar manusia, kemampuan untuk

bernalar. Entitas yang memperlihatkan fungsi-fungsi seperti : menyerap, mengamati, mengingat, membayangkan, memahami, merasa, membangkitkan emosi, menghendaki, menalar, mengadakan suatu perhitungan menuju ke suatu masa depan, serta menilai. Pengertian lain bahwa pemikiran menunjuk pada proses kegiatan mental maupun hasilnya. Interpretasinya tergantung pada pandangan seseorang berkenaan dengan metafisika, universalitas (hal-hal universal) dan epistemologi. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hasan Alwi, 2002:873) mendefinisikan pemikiran sebagai proses, cara dan perbuatan memikir. Sehingga Pemikiran yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah proses, cara, suatu perhitungan menuju ke suatu masa depan dan perbuatan memikir dari Abdul Kahar Muzakkar mengenai konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia.

b. Politik

Kata politik berasal dari Yunani yaitu politikos (menyangkut warga negara) dan polites (seorang warga negara). Politik menurut Aristoteles dalam kamus filsafat (Lorens, 1996:793) adalah cabang pengetahuan praktis, politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Roger Soltau berpendapat bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, serta hubungan negara dengan warganya dan juga dengan negara lain. Sementara Surya Endra dalam *Kamus Politi* (1979:209) mendefinisikan politik sebagai ilmu tatanegara dan cara memerintah negara,



teori dan praktek dari gerakan mencampuri urusan negara. Sedangkan *J-Barent* dalam Sosiologi Politik mendefinisikan politik sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Dan Miriam Budiardjo berkesimpulan bahwa Politik dalam suatu negara (State) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy) dan alokasi atau distribusi (allocation or distributon). Sehingga dari berbagai definisi tersebut, yang dimaksud politik dalam judul skripsi ini adalah ilmu yang mempelajari kehidupan tatanegara Indonesia.

#### c. Negara

Menurut Miriam Budiardjo (2008:47); negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Mengutip pendapat Roger Soltau dalam Miriam Budiardjo bahwa:

negara adalah agen (agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (the state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs of and in the name of the community).

Berdasarkan pemikiran Miriam Budiarto di atas, yang dimaksud negara dalam judul skripsi ini adalah konsep negara Indonesia menurut Abdul Kahar Muzakkar.

#### d. Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah atau perintah, kedua kata tersebut memiliki keterkaitan yaitu antara pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Menurut W. S. Surya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Sedangkan pemerintahan adalah organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk mengurus kehidupan suatu negara. Yang dimaksud negara dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. sehingga konsep pemerintahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep pemerintahan Indonesia yang digagas oleh Abdul Kahar Muzakkar.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas, peneliti merumuskan masalah utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu " *Bagaimana Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia?*".

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, diajukan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah yang akan diuraikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Abdul Kahar Muzakkar?
2. Bagaimana latar belakang munculnya gerakan dan pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar di Indonesia tahun 1950an?
3. Bagaimana landasan dan pokok pikiran politik Abdul Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TII dan masyarakat di Sulawesi Selatan?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Abdul Kahar Muzakkar.
2. Mendeskripsikan latar belakang munculnya gerakan dan pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar serta menjelaskan kondisi sosial politik pemerintahan Indonesia pada tahun 1950an.
3. Mendeskripsikan Landasan dan pokok-pokok pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia.
4. Mendeskripsikan pengaruh pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TII dan masyarakat di Sulawesi Selatan.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengenal tokoh Kahar Muzakkar dan gerakannya.
2. Memahami Pemikiran politik Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia
3. Memperkaya penulisan sejarah Intelektual dan sejarah politik di Indonesia, khususnya bagi jurusan pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung.
4. Titik fokus dalam penelitian ini adalah pemikiran Kahar Muzakkar mengenai konsep negara dan pemerintahan Indonesia, sehingga secara teoritik hasil dan manfaatnya mampu memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam ranah sejarah intelektual dan sejarah politik.
5. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian dalam lingkup yang luas dan mendalam.

### **1.5 METODOLOGI PENELITIAN**

Metode merupakan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam melakukan penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Helius Sjamsuddin, 2007:13). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode historis. Metode historis adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (Louis Gottchlak,

1986:32). Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan pengujian dan analisis terhadap sumber-sumber yang berhubungan dengan kajian yang peneliti bahas.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian sejarah ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Heuristik

Heuristik (Heuristics) atau dalam bahasa Jerman *Quellenkunde*, merupakan suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti (Helius Sjamsuddin, 2007:86). Sementara menurut Ismaun (2005:41-42) *Quellenkunde* adalah pengetahuan tentang sumber-sumber sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberi pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lampau. Sehingga kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti melakukan kegiatan pencarian sumber-sumber sebagai bagian dari pencarian pengetahuan mengenai kajian yang diteliti.

Kegiatan pencarian serta pengumpulan sumber ini merupakan tahap awal bagi peneliti untuk mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Pencarian sumber-sumber ini peneliti lakukan dengan mencari sumber-sumber buku, *Browsing internet*, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Dalam hal ini peneliti mencoba mengunjungi berbagai Perpustakaan seperti Perpustakaan Universitas pendidikan Indonesia, Perpustakaan Universitas Padjadjaran. Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika dan

Perpustakaan Dinas Sedjarah Angkatan Darat Bandung. Pencarian buku-buku pun peneliti lakukan di Toko-toko Buku seperti Toko buku Palasari Bandung, Toko Buku di Jalan Dewi Sartika, Toko buku Gramedia dan beberapa pameran buku yang diadakan di Bandung. Pencarian sumber-sumber ini peneliti fokuskan pada sumber-sumber yang pastinya berhubungan dengan Abdul kahar Muzakkar, pemikirannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Selain itu, peneliti pun melakukan kegiatan mencari dokumen-dokumen atau referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan pemikiran Abdul Kahar Muzakkar.

## 2. Kritik dan analisis sumber

Setelah kegiatan pencarian dan penemuan sumber-sumber berhasil dilakukan, tahap kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penilaian dan mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan tersebut baik dari buku, artikel, *Browsing internet*, sumber tertulis, arsip dan hasil dari penelitian serta sumber lainnya yang relevan. Bagusnya, seorang peneliti setelah menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber tersebut tidak begitu langsung menerima apa saja yang tercantum atau tertulis dalam sumber-sumber tersebut. Sehingga menurut Helius Syamsuddin, peneliti harus menyaring secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama, agar terjaring fakta yang menjadi pilihan peneliti, yang langkah ini dinamakan kritik sumber (2007:131). Kritik sumber terbagi menjadi dua bagian yaitu kritik eksternal merupakan cara pengujian kebenaran sumber sejarah dari aspek-aspek luar sumber tersebut yang digunakan. Kemudian kritik internal yaitu pengujian kebenaran yang dilakukan terhadap isi dari sumber sejarah tersebut. Pada langkah ini peneliti akan



menyaring informasi ataupun data yang diperoleh guna mendapatkan hasil penelitian yang baik, relevan dan valid.

Kaitannya dengan penelitian skripsi ini, setelah peneliti menemukan berbagai sumber yang berhubungan dengan Abdul Kahar Muzakkar, peneliti mencoba menyaring informasi-informasi tersebut dan hanya data-data yang relevan dan valid saja yang menjadi fakta pilihan peneliti sebagai sumber dalam penelitian ini. Sehingga tidak semua sumber atau data dapat menjadi bahan rujukan peneliti.

### 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah selanjutnya setelah dilakukan kritik dan analisis sumber. Interpretasi adalah kegiatan menafsirkan fakta-fakta yang sudah diperoleh peneliti melalui cara mengolah fakta yang telah dikritisi dengan merujuk beberapa referensi yang mendukung kajian peneliti. Menurut Gottschalk dalam Ismaun (2005:56), penafsiran sejarah itu memiliki tiga aspek penting, yaitu : *pertama*, analisis-kritis yaitu menganalisis struktur intern dan pola-pola hubungan antar fakta-fakta. *Kedua*, historis-substantif yaitu menyajikan suatu uraian prosesusal dengan dukungan fakta-fakta yang cukup sebagai ilustrasi suatu perkembangan. Sedangkan *ketiga* adalah sosial-budaya yaitu memperhatikan manifestasi insani dalam interaksi dan interrelasi sosial-budaya.

Didalam penelitian ini, tahap interpretasi dilakukan oleh peneliti dengan membuat penafsiran-penafsiran terhadap sumber-sumber atau fakta-fakta dan menganalisisnya secara objektif, fakta-fakta sejarah tersebut dikupas secara ilmiah dan kritis sehingga mendapatkan analisis-analisis yang dapat dipertanggung

jawabkan. Mengkaji pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar membutuhkan pisau analisis yang tajam untuk dapat menyelami haluan berpikirnya, sumber-sumber yang diperoleh pun tidak semuanya sama, artinya ada beberapa sumber yang saling bertolak belakang dan peneliti harus bisa menafsirkan dan memilih data secara objektif. Sehingga selain harus menginterpretasikan sumber-sumber tersebut, penulis pun mencoba memasukan beberapa teori dan konsep sebagai alat analisis lain agar mendapatkan sebuah penafsiran yang akurat.

#### 4. Historiografi

Historiografi adalah usaha mensintesis seluruh hasil penelitian atau penemuan yang berupa data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu penulisan yang utuh, baik itu berupa karya besar ataupun hanya berupa makalah kecil (Helius Sjamsuddin, 2007:156). Sama halnya dengan pendapat Ismaun (2005:28), bahwa Historiografi ialah usaha untuk mensintesis data-data dan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tahap historiografi yang penulis lakukan adalah dalam bentuk tulisan setelah melewati tahap pengumpulan dan penafsiran sumber-sumber sejarah. Fakta-fakta yang penulis peroleh disajikan menjadi satu kesatuan tulisan dalam skripsi yang berjudul "Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang Konsep Negara dan Pemerintahan Indonesia".

Dalam skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari : Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab II

merupakan tinjauan pustaka yang terdiri atas teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bab III adalah bagian metodologi penelitian, terdiri dari tahap persiapan dan, tahap pelaksanaan penelitian, dijelaskan pula mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara bab IV yang merupakan inti dari skripsi ini adalah bagian pembahasan, bagian yang secara panjang lebar menjawab semua pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, di bagian ini pula peneliti melakukan interpretasi terhadap pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir adalah bab V merupakan kesimpulan dari penelitian.

## **1.6 TEKNIK PENELITIAN**

Teknik penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah dengan Studi Literatur, yakni teknik mengumpulkan sumber-sumber yang relevan serta mendukung terhadap penelitian yang dikaji oleh peneliti baik itu berasal dari sumber buku, internet, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fokus kajian yang diteliti. Setelah dikritisi secara eksternal dan internal, penulis kemudian melakukan analisis. Hasil analisis inilah yang dijadikan acuan penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selain studi literatur, peneliti juga menggunakan teknik penelitian Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, maka sumber-sumber yang didapat akan semakin beragam dan peneliti tidak kekurangan sumber.

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan sistem penulisan Harvard sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

### 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan. Adapun fungsi dari pembagian ini bertujuan memudahkan penulisan dan sistematisasi dalam memahami penulisan.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya berisi penjelasan mengapa masalah tersebut diteliti dan penting untuk diteliti, serta mengenai alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Pada bab ini juga berisi perumusan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis dari berbagai referensi yang berhubungan dengan "*Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar tentang Konsep Negara dan pemerintahan Indonesia*". Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang relevan sebagai alat pisau analisis dalam interpretasi penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara

pengolahan sumber, analisis dan cara penulisannya. Dengan langkah penelitian yang dimulai dari Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Semua prosedur dari mulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan sampai pada tahap penulisan penelitian akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV Negara dan pemerintahan Indonesia dalam pandangan Abdul Kahar Muzakkar. Bab ini merupakan isi utama dari tulisan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana pemikiran Kahar Muzakkar mengenai konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Dalam bab ini, selain menjelaskan jawaban dari rumusan masalah, bagian ini merupakan kemampuan peneliti untuk mengungkapkan hasil penelitiannya dalam sebuah tulisan dan dalam hal ini berbentuk skripsi.

Bab V Kesimpulan, merupakan inti jawaban serta analisis penulis terhadap masalah-masalah secara keseluruhan yang merupakan hasil dari penelitian. Hasil akhir ini merupakan hasil penelitian serta interpretasi penulis mengenai inti dari pembahasan. Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang didapatkan setelah mengkaji permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.